Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh
Korporasi Tambang
Renata Mulya, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
INTISARI ..... **vii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Keaslian Penelitian 7
E. Kegunaan Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup **14**
1. Kejahatan Lingkungan dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup 14
2. Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU PPLH 20
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU PPLH 25
B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan dalam Hukum Lingkungan Indonesia **31**
1. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan 31
2. Pidana dan Pemidanaan dalam Hukum Lingkungan Indonesia berdasarkan UU PPLH 35
C. Tinjauan Umum tentang Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan **38**
D. Tinjauan Umum tentang Indikator Efektivitas Pemulihan Lingkungan **41**
BAB III METODE PENELITIAN **51**
A. Jenis dan Sifat Peneltian **51**
1. Jenis Penelitian 51

Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh
Korporasi Tambang
Renata Mulya, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Sifat Penelitian 52
B. Data Penelitian 54
C. Cara Pengumpulan Data 53
D. Analisis Hasil 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A. Praktik Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi Tambang dalam Putusan Pengadilan 64
1. Kedudukan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Sistem Pemidanaan Lingkungan Hidup di Indonesia 67
2. Praktik Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan yang Melibatkan Korporasi Tambang 75
   a. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid,Sus-LH/2017/Pn.Trg – PT Indominco Mandiri 77
   b. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN. Unh – PT Pertambangan Nikel Nusantara 86
   c. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 31/Pid.B/LH/2023/Pn Mre – PT Lematang Coal Lestari 95
   d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 9114K/Pid.Sus-Lh/2025 – PT Andalas Jaya Perkasa Gas 105
   e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6987K/Pid.Sus-LH/2022 – PT Belfat Indah Permai 116
3. Karakteristik Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi Tambang dan Implikasinya terhadap Pemidanaan 127
4. Analisis Komparatif dan Evaluasi Praktik Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Linkungan oleh Korporasi Tambang 130
   a. Dasar Pemilihan Putusan sebagai Sampel Analisis 130
   b. Pola Umum dan Permasalahan dalam Praktik Penerapan Pidana Tambahan 133
B. Perumusan Ideal Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-

Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh
Korporasi Tambang
Renata Mulya, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undangan untuk Meningkatkan Efektivitas Pemulihan Lingkungan.... 143

1. Kelemahan Pengaturan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan dalam Hukum Positif Indonesia.....145
2. Kesenjangan antara Pengaturan Normatif dan Praktik Pemidanaan (Gap Normatif Empiris) 153
3. Prinsip dan Pendekatan dalam Perumusan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pdana yang Berorientasi pada Pemulihan Lingkungan.... 160
4. Model ideal Perumusan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan..... 173
    a. Penguatan Kedudukan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Sistem Pemidanaan.....175
    b. Pengaturan Mekanisme Pelaksanaan dan Eksekusi Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan 180
    c. Pengaturan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Lingkungan 190
    d. Integrasi Pemidanaan dengan Tujuan Pemulihan dalam Kerangka Hukum Lingkungan 194
5. Implikasi Penguatan Pidana Tambahan Perbaikan terhadap Efektivitas Pemulihan Lingkungan 199

BAB V PENUTUP.....203

A. Kesimpulan.....203

B. Saran 205

DAFTAR PUSTAKA.....208